

ABSTRAK

Nizar Bangkit Permana Putra, 12103173025, Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar), Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Abd. Khoir Wattimena, M.H.

Kata Kunci : Musrenbang Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Hukum Positif, *Fiqh Siyasah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya menyalurkan pendapat, ide dan gagasan pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar cenderung belum maksimal. Pembangunan desa tidak akan bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya peran aktif masyarakat desa untuk membantu mewujudkan pembangunan desa yang terarah sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Kepala Desa dan jajarannya di pemerintahan desa terus berupaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam keikutsertaannya pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa melalui perbaikan sistem dan kebijakan yang dirasa kurang dan melengkapi kekurangan tersebut.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, 2) Bagaimana pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar berdasar Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021, 3) Bagaimana pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dalam konsep *fiqh siyasah*. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sesuai dengan alur pelaksanaan dan tujuan prioritas pembangunan, 2) Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sesuai dengan alur berdasar Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021, 3) Untuk mengetahui bagaimana penegakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di

desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk mencapai kemaslahatan bersama perspektif *Fiqh Siyasah*.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi (*document research*). Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sebagai perwujudan atas cita-cita dan kesejahteraan masyarakat desa yang mana dalam sebuah proses perencanaan pembangunan desa terus memerlukan keterlibatan masyarakat masih belum maksimal dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pola pemerintahan kepala desa yang lama dan ketidaksesuaian terhadap prioritas realisasi pembangunan yang sudah disepakati pada saat Musrenbang desa dengan kenyataan di lapangan terkait kebutuhan masyarakat. Hal tersebut membawa dampak pada pergantian kepemimpinan Kepala Desa dan jajarannya di pemerintahan Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang terus berupaya untuk mengajak dan meyakinkan kembali masyarakat agar turut ikut andil dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa. 2) Berdasarkan konsep pembahasan *fiqh siyasah*, mengajarkan bahwa berpartisipasi untuk menyalurkan gagasan atau pendapat utamanya dalam kegiatan Musrenbangdes adalah sebuah hal yang wajib. Dan tidak boleh jika seseorang tidak berpartisipasi atau acuh tak acuh dalam hal kemaslahatan ummat atau kepentingan umum. Perlu diketahui bahwasannya dasar dari pola tatananan suatu pemerintahan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian (kebaikan) bukan keburukan serta berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

Nizar Bangkit Permana Putra, 12103173025, Effectiveness of Implementing Village Development Planning Deliberations on Village Development Planning from Positive Legal Perspective and Siyasa Fiqh (Case Study in Purworejo Village, Sanankulon District, Blitar Regency), Department of Constitutional Law, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, Abd. Khoir Wattimena, M.H.

Keywords: Village Development Planning Deliberation, Village Development Planning, Positive Law, Fiqh Siyasa.

This research is motivated by the participation of village communities in channeling opinions, thoughts and ideas at Development Planning Deliberation activities in Purworejo village, Sanankulon District, Blitar Regency which tends to not be optimal. Village development will not be able to run optimally without the active role of village communities to help realize targeted village development as part of the national development system in accordance with the mandate of statutory regulations. The Village Head and his staff in the village government continue to strive to restore community confidence in their participation in Village Development Plan Deliberation activities by improving systems and policies that are felt to be lacking and completing these deficiencies.

The formulation of the problem in this thesis is: 1) How is the Development Plan Deliberation (Musrenbang) implemented in Purworejo village, Sanankulon District, Blitar Regency, 2) How is the Development Plan Deliberation implemented in Purworejo village, Sanankulon District, Blitar Regency based on Regent's Regulation Number 59 of 2021, 3) How is the Development Plan Deliberation implemented in Purworejo village, Sanankulon District, Blitar Regency using the concept of siyasa fiqh. The objectives of this research are: 1) To find out how the Development Plan Deliberation is held in Purworejo village, Sanankulon District, Blitar Regency in accordance with the implementation flow and development priority objectives, 2) To find out how the Development Plan Deliberation is held in Purworejo village, Sanankulon District, Blitar Regency in accordance with the flow based on Regent Regulation Number 59 of 2021, 3) To find out how to enforce the implementation of the Development Plan Deliberation in Purworejo village, Sanankulon District, Blitar Regency to achieve mutual benefit from the Fiqh Siyasa perspective.

The research method used by researchers is a qualitative method with a type of empirical research or also called field research. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, documentation (document research). Meanwhile, data analysis techniques use data reduction, data display, as well as drawing conclusions and verification.

The results of this research show that: 1) The implementation of the Village Development Plan Deliberation in Purworejo Village, Sanankulon District, Blitar Regency as an embodiment of the ideals and welfare of the village community, where the village development planning process continues to require community involvement is still not optimal due to distrust the community regarding the old pattern of village head governance and the mismatch between the development realization priorities that were agreed upon during the village Musrenbang with the reality on the ground regarding community needs. This has had an impact on the change in leadership of the Village Head and his staff in the Purworejo Village government, Sanankulon District, Blitar Regency, who continue to strive to invite and convince the community to take part in making village development plans through the Village Development Planning Conference. 2) Based on the concept of discussing fiqh siyasah, teaching that participating to channel ideas or main opinions in Musrenbangdes activities is mandatory. And it is not permissible if someone does not participate or is indifferent when it comes to the benefit of the ummah or the public interest. It is important to know that the basis of the governance pattern and the policies issued by the holder of power (government) must be to create benefits and avoid harm because one of the objectives of the law is to create peace (goodness) and not evil and to support the welfare of society.

ملخص

نزار بانجكيت بيرمانا بوترا، 12103173025، فعالية تنفيذ قرية مورينبانج في تخطيط تنمية القرية من منظور قانوني إيجابي وفقه السياسة، قسم القانون الدستوري، جامعة السيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونج أجونج، عبد. خوير وتيمينا، م.ح.

الكلمات المفتاحية: قرية مسرينبانج، تخطيط تنمية القرية، القانون الوضعي، فقه السياسة.

الدافع وراء هذا البحث هو مشاركة المجتمعات القروية في توجيه الآراء والأفكار والأفكار في أنشطة مداولات تخطيط التنمية (موسرينبانج) في قرية بوروريجو، منطقة سانانكولون، مقاطعة بليتار، والتي لا تميل إلى أن تكون الأمثل. لن تكون تنمية القرى قادرة على العمل على النحو الأمثل دون الدور النشط للمجتمعات القروية للمساعدة في تحقيق التنمية القروية المستهدفة كجزء من نظام التنمية الوطني وفقًا لتفويض اللوائح القانونية. يواصل رئيس القرية وموظفوه في حكومة القرية السعي لاستعادة ثقة المجتمع في مشاركتهم في أنشطة مداولات خطة تنمية القرية (موسرينبانج) من خلال تحسين الأنظمة والسياسات التي يشعر أنها ناقصة واستكمال أوجه القصور هذه.

صياغة المشكلة في هذه الأطروحة هي: (١) كيف يتم تنفيذ مداولات خطة التنمية (موسرينبانج) في قرية بوروريجو، منطقة سانانكولون، مقاطعة بليتار، (٢) كيف يتم تنفيذ مداولات خطة التنمية (موسرينبانج) في قرية بوروريجو، منطقة سانانكولون، ريجنسي بليتار استنادًا إلى لائحة الوصي رقم ٥٩ لعام ٢٠٢١، (٣) كيف يتم تنفيذ مداولات خطة التنمية (موسرينبانج) في قرية فورواراجا، منطقة سانانكولون، ريجنسي بليتار باستخدام مفهوم فقه السياسة. أهداف هذا البحث هي: (١) لمعرفة كيفية عقد مداولات خطة التنمية (موسرينبانج) في قرية بوروريجو، منطقة سانانكولون، مقاطعة بليتار وفقًا لتدفق التنفيذ والأهداف ذات الأولوية للتنمية، (٢) لمعرفة كيفية تنفيذ التنمية تُعقد مداولات الخطة (موسرينبانج) في قرية بوروريجو، منطقة سانانكولون، مقاطعة بليتار وفقًا للتدفق بناءً على لائحة ريجنسي رقم ٥٩ لعام ٢٠٢١، (٣) لمعرفة كيفية فرض تنفيذ مداولات خطة التنمية (موسرينبانج) في بوروريجو قرية، منطقة سانانكولون، ولاية بليتار لتحقيق المنفعة المتبادلة من منظور فقه السياسة.

طريقة البحث التي يستخدمها الباحثون هي طريقة نوعية ذات نوع من البحث التجريبي أو تسمى أيضًا بالبحث الميداني. تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق (بحث الوثائق). وفي الوقت

نفسه، تستخدم تقنيات تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات بالإضافة إلى استخلاص النتائج والتحقق.

تظهر نتائج هذا البحث ما يلي: (١) تنفيذ مداورات خطة تنمية القرية (موسرينبانج) في قرية بوروريجو، منطقة سانانكولون، مقاطعة بليتار كتجسيد لمُثل ورفاهية مجتمع القرية، حيث تستمر عملية تخطيط تنمية القرية. إن طلب مشاركة المجتمع لا يزال غير مثالي بسبب عدم ثقة المجتمع فيما يتعلق بالنمط القديم لحكم رئيس القرية وعدم التوافق بين أولويات تحقيق التنمية التي تم الاتفاق عليها خلال قرية موسرينبانج مع الواقع على الأرض فيما يتعلق باحتياجات المجتمع. وكان لهذا تأثير على التغيير في قيادة رئيس القرية وموظفيه في حكومة قرية بوروريجو، منطقة سانانكولون، منطقة بليتار، الذين يواصلون السعي لدعوة المجتمع وإقناعه بالمشاركة في وضع خطط تنمية القرية من خلال القرية. مؤتمر التخطيط التنموي (موسرينبانج). (٢) بناءً على مفهوم مناقشة فقه السياسة، فإن تعليم أن المشاركة في توجيه الأفكار أو الآراء الرئيسية في أنشطة موسرينبانج دي أمر إلزامي. ولا يجوز إذا لم يشارك أحد أو كان غير مبالٍ فيما يتعلق بمصلحة الأمة أو المصلحة العامة. ومن المهم أن نعرف أن أساس نمط الحكم والسياسات التي يصدرها صاحب السلطة (الحكومة) يجب أن يكون خلق المنافع ودرء المضار لأن من أهداف القانون خلق السلام (الخير) وليس الشر. ودعم رفاهية المجتمع.